

**PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DAN
KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI PENYUSUNAN
ANGGARAN DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Pemda Kabupaten Wajo)**

Rasyidah Nadir¹⁾, Tawakkal¹⁾, Eti Yusrianti¹⁾, Muhammad Arsyad¹⁾
¹⁾ Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar

ABSTRACT

This study aims to empirically test whether the moderating variables of local government information systems affect the relationship between budgetary participation and budget performance in local governments. Research on budgetary participation and performance uses a contingency approach because it produces inconsistent findings from one researcher to another. The population in this study is the SKPD unit within the local government of Wajo district. Sampling was done by purposive sampling. The data collection method was carried out through a questionnaire survey. Data were analyzed using multiple regression method. The results of this study indicate that the budgetary participation has no significant effect on local government budget performance which is moderated by regional information system variables and the budgetary participation has no significant effect on local government budget performance moderated by organizational commitment variable. The influence of budgetary participation on local government budget performance will be high if it has a local government information system and high organizational commitment, and vice versa.

Keywords: *Budget Participation, Performance, local government information systems, Organization Commitment.*

1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah daerah dengan Implementasi beberapa peraturan dan kebijakan. Salah satu kebijakan yang terkait tentang informasi publik yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditujukan antara lain untuk menjamin hak warga Negara mengetahui kebijakan public; mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menjadi penting bagi pemerintah untuk semakin insentif memfasilitasi terselenggaranya pelayanan informasi yang baik kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Penerapan sistem informasi dan teknologi di pemerintah daerah merupakan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan daerah secara digital baik dalam pengelolaan keuangan maupun pelayanan publik. Hal ini terkait dengan penguatan kebijakan yang melandasi implementasi SIPD melalui perubahan atas Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Kesuksesan suatu model sistem teknologi informasi seperti yang telah dikembangkan oleh DeLone and Mclean adalah suatu sederhana tetapi dianggap cukup valid. Hal ini tentunya dalam implementasi sistem informasi pemerintah daerah memudahkan aparatur pemerintah dalam proses penyusunan anggaran. Model aplikasi sistem informasi yang lengkap tetapi sederhana merefleksikan ketergantungan dari enam pengukuran kesuksesan sistem informasi yaitu kualitas sistem (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), pengguna (*use*), kepuasan pemakai (*user satisfaction*), dampak individual (*individual impact*), dan dampak organisasi (*organization impact*) [7].

Komitmen organisasi sebagai variable moderating mempengaruhi secara signifikan hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial [11]. Terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah, variabel komitmen organisasi sebagai variable moderating berpengaruh signifikan terhadap partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja apatur pemeintah daerah [10].

Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penganggaran pemerintah daerah mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran, misalnya pembuatan program atau kegiatan pada unit kerja. Partisipasi dapat diartikan sebagai proses interaksi antara dua individu, atasan dan bawahan untuk menetapkan anggaran yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Secara umum, partisipasi dianggap memiliki pengaruh

¹ Rasyidah Nadir, Telp 082197211002, rasyidahnadir@poliupg.ac.id

positif terutama jika dikaitkan dengan moral, motivasi, kinerja, kepuasan kerja, dan sikap bawahan terhadap pekerjaan atasan dan organisasi [9].

Bawahan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap mereka [2]. Hal ini berarti bahwa kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyusunan anggaran dapat meningkatkan rasa ikut terlibat dan mengendalikan anggaran tersebut [6]. Partisipasi sebagai suatu proses mengevaluasi kinerja para individu dan menetapkan penghargaan atas dasar sasaran anggaran yang telah dicapai serta keterlibatan dan pengaruh para individu dalam penyusunan anggaran [3].

Proses penyusunan anggaran merupakan proses yang penting dan kompleks, menimbulkan kemungkinan dampak fungsional dan disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi [7]. Untuk mencapai dampak disfungsional anggaran tersebut Argyris menyatakan perlunya melibatkan manajemen yang lebih rendah dalam proses penyusunan anggaran [2]. Proses penyusunan anggaran merupakan proses penetapan peran yang menggunakan informasi akuntansi pertanggungjawaban untuk menyampaikan nilai dari sumber ekonomi yang disediakan bagi pimpinan pusat pertanggungjawaban guna melaksanakan perannya masing-masing [9].

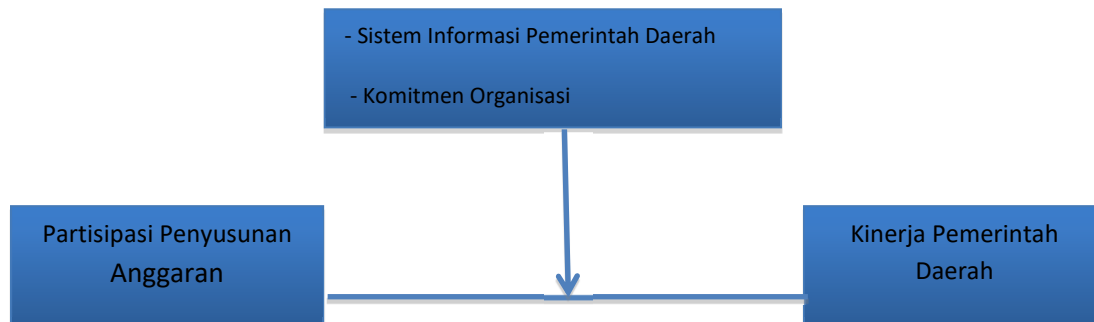
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris sejauh mana pengaruh variabel moderating sistem informasi pemerintah daerah dan komitmen organisasi mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. Pemerintah Kabupaten Wajo di masa pandemi Covid-19 dihadapkan dengan berbagai perubahan kebijakan proses penyusunan anggaran dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi Covid-19, proses *refocusing*/relokasi anggaran Covid-19 harus dilakukan di semua instansi pemerintah pusat maupun daerah, proses perubahan anggaran di masa pandemi akan memberikan pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penerapan sistem informasi pemerintah daerah berdasarkan amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai bentuk implementasi teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan komitmen organisasi yang kuat tentunya akan berpengaruh dalam proses penyusunan anggaran dan kinerja pemerintah daerah kabupaten Wajo.

Penelitian ini menjadi isu yang penting untuk diuji karena sistem informasi pemerintah daerah merupakan aplikasi dari penerapan teknologi informasi dan komitmen organisasi merupakan faktor kontijensi dalam partisipasi penyusunan anggaran yang berhubungan dengan kinerja anggaran pada pemerintah daerah kabupaten Wajo. Pendekatan kontijensi memungkinkan adanya variabel-variabel lain yang dapat bertindak sebagai faktor moderating atau interverning. Pemerintah Kabupaten Wajo di masa pandemi Covid-19 dihadapkan dengan berbagai perubahan kebijakan proses penyusunan anggaran dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi Covid-19, proses *refocusing*/relokasi anggaran Covid-19 harus dilakukan di semua instansi pemerintah pusat maupun daerah, hal ini tentunya memberikan pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penerapan sistem informasi pemerintah daerah berdasarkan amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai bentuk implementasi teknologi informasi dan komitmen organisasi tentunya berpengaruh dalam proses penyusunan anggaran dan kinerja pemerintah daerah kabupaten Wajo, dan hal ini menarik untuk dikajisecara empiris dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian mengenai hubungan partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap kinerja telah banyak dilakukan pada organisasi privat dan organisasi sektor publik namun beberapa hasil penelitian menunjukkan hubungan yang tidak konsisten antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. hal ini menjadi isu yang menarik dan masih banyak diperdebatkan. Beberapa peneliti terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Penelitian yang menguji hubungan tersebut antara lain Argyris (1952), Brownell dan McInnes (1986), Indriantoro (1993), Ulupui (2003), Jamaluddin (2006), Sardjito dan Muthaher (2007), dan Nadir (2008). Hasil penelitian mereka menemukan hubungan positif dan signifikan antara anggaran partisipatif dengan kinerja manajerial. Namun hasil penelitian Milani (1975), Kennis (1979), serta Haliman (1997) menemukan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara anggaran partisipasi dengan kinerja manajerial. Ketidakkonsistenan beberapa hasil temuan penelitian terdahulu terjadi karena hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial tergantung pada faktor-faktor situasional atau lebih dikenal dengan istilah variabel kontijensi (*Contingency Variable*).

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya berhubungan dengan faktor kontijensi, maka penelitian ini memperluas penelitian yang dilakukan dengan melihat hubungan interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan sistem informasi pemerintah daerah dan komitmen organisasi yang mempengaruhi kinerja, berdasarkan **model Hartmann and Moers (1999)** maka hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dan sistem informasi pemerintah daerah akan mempengaruhi kinerja. Pengaruh partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap kinerja akan tinggi apabila sistem informasi pemerintah daerah yang dimiliki tinggi. Dan Pengaruh partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap kinerja akan rendah apabila sistem informasi pemerintah daerah yang dimiliki rendah.

H2: Interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dan sistem informasi pemerintah daerah akan mempengaruhi kinerja. Pengaruh partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap kinerja akan tinggi apabila komitmen organisasi yang dimiliki tinggi. Dan Pengaruh partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap kinerja akan rendah apabila komitmen organisasi yang dimiliki rendah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ASN di seluruh SKPD pemerintah daerah kabupaten Wajo, penyampelan atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah ASN di lingkup pemerintah daerah Wajo yang terlibat secara langsung pada proses penyusunan anggaran di setiap SKPD.

Teknik analisis data menggunakan metode regresi berganda (*multiple regression*). Metode ini menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Metode analisis data adalah sebagai berikut:

1. untuk menguji hipotesis 1 (H1)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_4 X_1 X_2 + \varepsilon$$

Dimana:

Y : Kinerja Pemerintah Daerah

α : Konstanta

X_1 : Partisipasi Penyusunan Anggaran

X_2 : Sistem Informasi Pemerintah Daerah

$X_1 X_2$: Interaksi antara X_1 dan X_2

$\beta_1 \beta_2 \beta_4$: Koefisien Regresi

ε : error

2. untuk menguji hipotesis 2 (H2)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_3 X_3 + \beta_5 X_1 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

Y : Kinerja Pemerintah Daerah

- α : Konstanta
- X_1 : Partisipasi Penyusunan Anggaran
- X_3 : Komitmen Organisasi
- $X_1 X_3$: Interaksi antara X_1 dan X_3
- $\beta_1 \beta_3 \beta_5$: Koefisien Regresi
- ϵ : error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian reliabilitas dan validitas menunjukkan bahwa keempat instrument dari masing-masing variabel penelitian partisipasi, kinerja, komitmen organisasi, dan sistem informasi pemerintah daerah yang digunakan cukup andal (*reliable*) dan sah (*valid*). Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian reliabilitas yang diperoleh di atas 0.60 (Nunnally, 1978) dalam Nadir [8]. Untuk instrumen partisipasi menunjukkan koefisien alpha (*cronbach alpha*) sebesar 0.73, instrumen kinerja sebesar 0.76, instrumen komitmen organisasi sebesar 0.85, dan instrumen sistem informasi pemerintah daerah sebesar 0.82. Dan nilai Kaiser’s MSA untuk keseluruhan instrumen di atas 0.50 dan nilai factor loading dari masing-masing item pertanyaan lebih dari 0.4 [5].

Penelitian ini terdiri atas dua hipotesis yang diuji yaitu, pertama untuk melihat apakah sistem informasi pemerintah daerah dapat memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja unit pemerintah daerah, kedua untuk melihat apakah komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja unit pemerintah daerah.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan uji analisis regresi, yaitu regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 21. Pemilihan analisis ini adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih dan juga untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

1. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk melihat apakah sistem informasi pemerintah daerah mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja unit pemerintah daerah. Hasil analisis regresi terjadi dalam tabel 1.

Tabel 1.

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	54.729	31.245		1.752	.086		
PA	-1.440	1.265	-1.670	-1.138	.261	.009	106.469
S	-1.385	1.235	-1.208	-1.121	.268	.017	57.479
moderat2	.060	.050	2.401	1.212	.232	.005	194.345

a. Dependent Variable: K

Tabel 1 menunjukkan kinerja dijelaskan oleh partisipasi penyusunan anggaran, sistem informasi pemerintah daerah, dan interaksi antara partisipasi dan sistem informasi pemerintah daerah dengan nilai (R^2) sebesar 0,050 dan nilai $F = 0,828$ signifikan pada $p = 0,485$ hal ini berarti model yang digunakan menunjukkan *goodness of fit* yang baik. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa koefisien β_4 (interaksi) tidak signifikan dengan nilai t hitung sebesar 1,212 dan signifikansi sebesar 0,232 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel sistem informasi pemerintah daerah yang dimiliki pegawai tidak mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja. Hasil pengujian ini tidak berhasil mendukung hipotesis 1. Artinya variabel sistem informasi pemerintah daerah yang dimiliki pegawai tidak dapat berperan sebagai variabel moderating di dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja.

Temuan ini tidak sesuai dengan penelitian Mia dan Winata menguji teknologi informasi sebagai variabel moderating yang mempengaruhi secara signifikan hubungan partisipasi dengan kinerja manajerial [12], begitu pula dengan penelitian Andersen Menguji penggunaan teknologi informasi dalam berkomunikasi secara signifikan akan mempertinggi efektivitas manager dalam berpartisipasi dan mempengaruhi kinerja[1]. Temuan ini mengindikasikan bahwa dengan penggunaan teknologi secara terintegrasi pada pemerintah daerah melalui implementasi sistem informasi pemerintah daerah pada proses penyusunan anggaran belum sepenuhnya

diterapkan dan dipahami oleh pegawai, sehingga partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan variabel moderating sistem informasi pemerintah daerah belum dapat meningkatkan kinerja.

2. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk melihat apakah komitmen organisasi mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja unit pemerintah daerah. Hasil analisis regresi terjadi dalam tabel 3.2

Tabel 2
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	31.713	24.610		1.289	.204		
KO	-.358	.713	-.588	-.502	.618	.014	69.721
PA	-.561	.943	-.651	-.595	.555	.016	60.767
moderat1	.019	.027	1.133	.703	.485	.008	132.035

a. Dependent Variable: K

Tabel 2 menunjukkan kinerja dijelaskan oleh partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi, dan interaksi antara partisipasi dan komitmen organisasi dengan nilai (R^2) sebesar 0,76 dan nilai $F = 1,284$ signifikan pada $p = 0,000$. Hal ini berarti model yang digunakan menunjukkan *goodness of fit* yang baik. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa koefisien β_5 (interaksi) tidak signifikan dengan nilai t hitung sebesar 0,703 dan signifikansi sebesar 0,485 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel komitmen organisasi yang dimiliki pegawai tidak mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja. Hasil pengujian ini tidak berhasil mendukung hipotesis 2. Artinya variabel komitmen organisasi yang dimiliki pegawai tidak dapat berperan sebagai variabel moderating di dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja.

Temuan ini sesuai dengan penelitian Randall (1990) dalam Nouri dan Parker (1998) menguji komitmen organisasi sebagai variabel moderating yang mempengaruhi secara signifikan hubungan antara partisipasi dengan kinerja manajerial. Penelitian Nouri dan Parker (1998) menemukan hasil bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempunyai hubungan positif dengan komitmen organisasi dan secara tidak langsung mempengaruhi hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan prestasi kerja [9]. Dan penelitian Sardjito dan Muthaher (2007) menemukan hasil bahwa komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi mempengaruhi secara signifikan hubungan partisipasi dengan kinerja pegawai/aparat pemerintah daerah [10].

Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat komitmen organisasi yang dimiliki pegawai/aparat pemerintah tidak cukup besar ketika terlibat dalam penyusunan anggaran yang seharusnya setiap pegawai/aparat pemerintah daerah harus menumbuhkan dan memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sehingga ketika kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemenuhan dasar masyarakat seperti program pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan dan berbagai program urusan wajib lainnya. Maka pemerintah daerah kabupaten/kota dikatakan mempunyai kinerja yang tinggi.

Pegawai/aparat yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran, jika menjadikan komitmen organisasi sebagai sebuah sikap dan perilaku yang saling mendorong hal-hal bagi unit organisasinya maka pegawai/aparat akan memiliki keyakinan yang pasti untuk mewujudkan tujuan organisasinya dan akan menumbuhkan loyalitas serta mendorong keterlibatan pegawai/aparat dalam pengambilan berbagai keputusan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat melalui pencerminan berbagai program dan kegiatan yang digunakan untuk membiayai program-program pelayanan umum bukan hanya memberikan bagian anggaran terbesar untuk membiayai anggaran belanja pegawai/aparat. Komitmen organisasi yang kuat seharusnya memperoleh perhatian dan kepedulian oleh aparat/pegawai serta pimpinan/manager public sehingga tujuan dan sasaran anggaran dapat tercapai, sehingga kinerja yang diharapkan akan meningkat.

Menurut dugaan peneliti, komitmen organisasi dalam penelitian ini tidak terdukung kemungkinan pegawai/aparat yang ikut dalam proses penyusunan anggaran mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasinya akan tetapi pimpinan dalam organisasinya mempunyai pengaruh yang dominan ketika pengambilan keputusan sehingga pelaksanaan berbagai program pelayanan umum untuk urusan wajib seperti

kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lingkungan belum menunjukkan kinerja yang meningkat bagi pemerintah daerah di kabupaten Wajo.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa system informasi pemerintah daerah belum sepenuhnya diterapkan dan dipahami ketika berpartisipasi dalam penyusunan anggaran sehingga hubungan yang diharapkan meningkatkan kinerja pemerintah daerah di kabupaten Wajo dalam penelitian ini tidak terpenuhi. Hal tersebut ditemukan sama untuk komitmen organisasi yang dimiliki pimpinan, pegawai/aparat. Hasil penelitian ini secara empiris menunjukkan bahwa interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan variable moderasi system informasi pemerintah daerah dan komitmen organisasi tidak signifikan mempengaruhi kinerja unit pemerintah daerah. Hal ini berarti, secara empiris system informasi pemerintah daerah dan komitmen organisasi tidak berperan sebagai variable pemoderasi (moderating) dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja unit pemerintah daerah. Sehingga penelitian ini tidak berhasil mendukung hipotesis 1 dan hipotesis 2 yang diajukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andersen, T.J. 2001. Information Technology, Strategic Decision Making Approaches and Organizational Performance Indifferent Industrial Setting. *Journal of Strategic Information System* 10, 101-119.
- [2] Argyris. 1952. *The Impact of Budgeting on People*. Ithaca: School of Business and Public Administration, Cornell University.
- [3] Brownell, P. 1982a. Participation in Budgeting Process, When it Works and When it doesn't. *Journal of Accounting Literature*. 124-150.
- [4] Chong, V.K dan K.M Chong. 2002. Budget Goal Commitment and Information Effects og Budget Participation on Performance: A Structural Equation Modelling Approach. *Behavioral Research in Accounting*. Vol.14 hal 65-86.
- [5] Harnanto, J. 2007. Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi. Andi: Yogyakarta.
- [6] Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. 2018. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- [7] Milani, K. W.1975. The Relationship of Participation in Budget Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: a Field Study. *The Accounting Review*, April, hal: 274-284.
- [8] Nadir, R. 2008. Pengaruh Desentralisasi, Komitmen Organisasi, dan Teknologi Informasi terhadap Hubungan antara Partisipasi penyusunan Anggaran dan Kinerja Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan. Tesis UGM.
- [9] Nouri, H and Parker R,J. 1998. The Relationship Between Budget Participation and Job Performance: The Roles og Budget Adequacy and Organizational Commitment. *Accounting, Organization and Society*, Vol 23 No.5/6 pp 467-483.
- [10] Sardjito dan Muthaher. 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemda: Budaya dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. Simposium Nasional Akuntansi X.
- [11] Ulupui. I. G. Ketut Agung. 2005. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Keadilan Distribusi, Keadilan Prosedural, dan Goal Commitment terhadap Kinerja Dinas. Tesis UGM.
- [12] Winata, Ianita Dan Mia, Lokman. 2005. Information Technology and the Performance Effect of Managers Participation in Budgeting: Evidence from the Hotel Industry. *International Journal of Hospitality Management*, hal 21-39.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terlaksana atas bantuan beberapa pihak. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Politeknik Negeri Ujung Pandang yang memberikan wadah dan sumber pendanaan bagi kami untuk penelitian, dan Pemerintah daerah kabupaten Wajo atas kesediaan sebagai responden dalam penelitian ini.